

**PENGGUNAAN *EXPERT ADVISOR* DI PASAR BERJANGKA
KOMODITI: STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM INDONESIA
DAN AMERIKA SERIKAT.**

Oleh: Muh. Afif Siduppa¹ dan Sulistiowati²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan dan penegakan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam ranah pemberian nasihat investasi berbasis *expert advisor* di pasar berjangka komoditi. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, penulis kemudian merumuskan rekomendasi penguatan yang dapat diterapkan agar pengaturan dan penegakan hukum Indonesia di sektor ini bisa lebih sempurna.

Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian berjenis normatif-empiris, yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk membedah norma dan implementasi hukum di kedua yurisdiksi dalam lanskap penggunaan *expert advisor* di pasar berjangka komoditi. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu wawancara untuk data primer dan studi pustaka untuk data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan deskriptif. Sebagai studi komparatif, penulis tidak hanya menggunakan pendekatan perundangan-undangan, namun juga pendekatan perbandingan guna menghasilkan kesimpulan melalui penalaran induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan dalam berbagai aspek. Berdasarkan perbandingan antara kedua negara, ada beberapa poin rekomendasi penguatan yang dapat dilakukan dalam hukum Indonesia. Dari segi pengaturan, perlu dilakukan perubahan atas syarat permodalan dalam perizinan, pengkajian pembebasan pendaftaran dan status kelembagaan Bappebti, serta perubahan delik pidana UU PBK dan revisi ketentuan yang ambigu. Adapun dari segi penegakan hukum, penguatan dapat dilakukan melalui pembenahan pelaksanaan restitusi, penguatan peran Bappebti dalam ranah perdata dan pidana, pendayagunaan skema penyelesaian alternatif untuk penuntasan kasus tertentu, pengkajian pembentukan SRO, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum melalui pembuatan portal informasi yang terpusat oleh Bappebti.

Kata kunci: *Expert Advisor*, Pasar Berjangka Komoditi, Bappebti, CFTC.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, 2019, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

***THE USE OF EXPERT ADVISOR IN COMMODITY FUTURES MARKET:
A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIAN AND UNITED
STATES LAW.***

By: Muh. Afif Siduppa¹ and Sulistiowati²

ABSTRACT

This legal writing aims to compare the legal regulations and enforcement between Indonesia and the United States in the field of investment advice based on expert advisors in commodity futures markets. Based on the results of this comparison, the authors then formulate recommendations for strengthening measures that can be implemented to improve Indonesia's legal regulations and enforcement in this sector.

The research methodology in this legal writing is normative-empirical, conducted by collecting and analyzing data to examine the legal norms and implementation in both jurisdictions within the landscape of expert advisor usage in the commodity futures market. Data collection was conducted through two methods: interviews for primary data and literature review for secondary data. The data obtained was then analyzed using qualitative and descriptive methods. As a comparative study, the author not only used a legislative approach but also a comparative approach to draw conclusions through inductive reasoning.

The results of this study indicate that legal regulations and enforcement in Indonesia and the United States have similarities and differences in various aspects. Based on the comparison of the two countries, there are several recommendations for strengthening that can be implemented in Indonesian law. In terms of regulation, changes need to be made to the capital requirements for licensing, the review of registration exemptions and the institutional status of Bappebti, as well as changes to criminal offenses under the PBK Law and the revision of ambiguous provisions. In terms of law enforcement, strengthening can be done by improving the implementation of restitution, strengthening the role of Bappebti in civil and criminal matters, utilizing alternative dispute resolution schemes to resolve certain cases, reviewing the establishment of SROs, and increasing the transparency and accountability of law enforcement through the creation of a centralized information portal by Bappebti.

Keywords: *Expert Advisor, Commodity Futures Market, Bappebti, CFTC.*

¹ Undergraduate Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

² Lecturer of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.